



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

RANCANGAN RENJA TAHUN 2020



PANGKALPINANG
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas kemudahan serta limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana amanat RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rancangan Rencana kerja Tahun 2020 ini dibuat dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menyelaraskan Rencana Kerja Perangkat Daerah khususnya Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap visi misi dan program prioritas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih periode 2017 – 2022, sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Pada akhirnya Semoga Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat mendukung program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memprioritaskan program pembangunan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah dan masyarakat Negeri Serumpun Sebalai. Kiranya Allah SWT meridhoi segala upaya dan niat baik yang kita lakukan dan menjadikannya sebagai amal ibadah untuk kita sekalian. Amin Ya Rabbal Alamin.

**INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**SUSANTO, S.E. Ak. CA. M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II	
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2018) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.....	28
 BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
 BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
 BAB V	
PENUTUP.....	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.	Perbandingan Program Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018.....	12
Tabel 2.1.2. (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perencanaan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2019.....	13
Tabel 2.2.1. (T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	21
Tabel 2.4.1. (T-C.31)	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	29
Tabel 3.2.1.	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat 2017-2022 (updating).....	35
Tabel 3.3.1. (T-C.33)	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	41

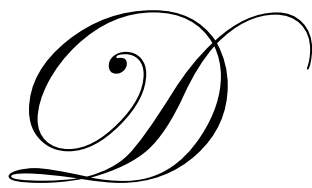
DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
- Lampiran 2 Laporan Realisasi Belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018
- Lampiran 3 Hasil Kesepakatan Kerjasama APIP - APH Terkait Laporan Pengaduan masyarakat yang Berindikasi Tipikor
- Lampiran 4 Rencana Aksi Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Program pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG



Dalam rangka menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 atas Visi Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun ketiga terhadap implementasi pelaksanaan RPJMD 2017-2022, perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai unit kerja di bawahnya sebagai bagian dari proses perencanaan strategis untuk pencapaian kinerja pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan pelaksanaan tahun ketiga Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang diselaraskan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan mengakomodir renstra K/L terkait terkait program prioritas nasional yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat dalam Rencana Kerja, yang memuat program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran, disertai indikator kinerja dan dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi

inspektorat di bidang pengawasan. Renstra yang telah ditetapkan tersebut direviu kembali dan telah dilakukan perubahan mengikuti perubahan RPJMD 2017-2022 yang sedang dalam proses pembahasan dan harmonisasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan dalam membantu pelaksanaan tugas Gubernur di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang tidak secara langsung termasuk dalam lingkup perangkat daerah yang melaksanakan program pembangunan prioritas riil dan sektor unggulan. namun sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat Daerah memiliki peran penting dan strategis serta signifikan dalam mewujudkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel serta pemerintahan yang *good governance* dan *clean government* dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas, bersih, responsif dan profesional.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- m. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

- a. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan serta acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 untuk mendukung RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
- b. Sebagai penjabaran rencana pembangunan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 yang berisikan program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi inspektorat di bidang pengawasan dan evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya;

1.3.2. Tujuan

- a. Memberikan arah dan pedoman atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 dengan indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Menyelaraskan dan mensinergikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dan Renstra K/L terkait dengan fungsi dan tugas Inspektorat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja kabupaten/kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lain yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang harus ditindaklanjuti.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan serta penjelasan terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.

Memuat hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota ataupun pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian SSDGs, dst serta uraian garis besar program dan kegiatan (jumlah program dan kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif)

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BAB V : PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam rangka memaksimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penguatan APIP, maka dilakukan reviu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu (Tahun 2018) dan hasil capaian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun berjalan sampai dengan periode Triwulan I Tahun Anggaran 2019 yang telah direalisasikan melalui penetapan program dan kegiatan di dalamnya yang mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan RPJMD 2017-2022.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2018) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2018 merupakan tahun pertama implementasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 dan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Pada Tahun Anggaran 2018, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan:



4 (empat) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan, dengan usulan pagu anggaran awal sebesar Rp. 8.653.899.200,00, yang sama sekali berbeda dengan program dan penganggaran kegiatan T.A. 2017 sebelumnya dengan 7 (tujuh) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan, yang terbagi dalam: √ Terdiri dari 4 (empat) program rutin dengan 25 (dua puluh lima) Kegiatan, dan
√ 3 (tiga) program pembangunan strategis dengan 13 (tiga belas) kegiatan sesuai kewenangan Inspektorat.



Setelah melalui berbagai tahapan proses perencanaan, terealisasi anggaran dalam APBD sebesar Rp. 7.513.930.030,00 dengan 4 (empat) program dengan 17 (tujuh belas) kegiatan;



Namun demikian pada pertengahan Tahun Anggaran 2018 terjadi penyesuaian anggaran untuk pembangunan prioritas dan pembayaran Gaji ke-14 dan Tunjangan Hari Raya ke-14 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mengakibatkan program/kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya kemudian disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah dan dilakukan rasionalisasi anggaran dalam Perubahan Rencana Kerja guna menyesuaikan dan menyelaraskan dengan program pembangunan prioritas daerah serta perubahan kebijakan pembangunan daerah.

Setelah dilakukan rasionalisasi dalam DPPA Tahun Anggaran 2018, terjadi pengurangan pagu sebesar Rp. 685.140.000,- (*Enam ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh ribu rupiah*) atau terjadi penurunan anggaran sebesar 9,91% dari anggaran awal DPA-OPD sebesar Rp. 7.513.930.030,- (*Tujuh milyar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu tiga puluh rupiah*) dengan jumlah program tetap dan 15 (lima belas) kegiatan, sehingga Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2018 melaksanakan rencana kerja sesuai fungsi dan tugasnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.828.790.030,00. Realisasi dan capaian program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.1.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2019 (yang merupakan tahun berjalan).

Tabel 2.1.1.

Perbandingan Program Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Inspektorat Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018

PROGRAM INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2012 – 2017					PERUBAHAN NOMENKLATUR PROGRAM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2017 – 2022				
NO	NAMA PROGRAM (T.A. 2017)	RPJM D	RKPD	RENJA	NO	NAMA PROGRAM (Tahun 2018 – 2022)	R PJMD	RKP D	RENJA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	1	1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	√	√	√
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	1	1					
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	1	1					
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	-	1					
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1	1	1					
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan keuangan	1	1	-					
7	Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1	1	-	2.	Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	√	√	√
8.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1	1	1					
9.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	1	1	1	3.	Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	√	√	√
					4.	Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya	√	√	√
JUMLAH		9	8	7		JUMLAH	4	4	4

Tabel 2.1.2. (T-C. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Perangkat Daerah
Sampai dengan Tahun 2019 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Target Outcome dan Output s.d. Tahun 2017 (Tahun n -3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (Outcome dan Output) Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan 2019	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Tahun n -2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (Tahun n -2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (n-1) 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)
4	05						FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN									
4	05	4	05	01			INSPEKTORAT DAERAH									
4	05	4	05	01	01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1. Tingkat kepuasan aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan 2. Skor (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah								
4	05	4	05	01	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan	100%	1.668.457.585	1.684.032.030,- (100%)	1.550.212.493 (100%)	92,05			

4	05	4	05	1	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	843.378.950	321.372.000 (100%)	310.828.025 (100%),	96,72			
4	05	4	05	1	01	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	100 Pegawai	N/A	123.540.000 (85 pegawai)	102.029.600,- (85 pegawai)	82,59			
4	05	4	05	1	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur *) T.A. 2017 (keg. Penilaian AK/Pelatihan JFT&JFU/ PKS) *) T.A. 2016 (keg. Penilaian AK/Pelatihan JFT&JFU/ PKS/ Bimtek Ak. Akrua/Sistem PKPT berbasis Resiko)	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	570.347.079	380.813.000	347.935.150,	91,37			
4	05	4	05	1	01	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 dokumen	20.255.000 (4 dokumen)	19.462.000 (4 dokumen)	13.625.000 (4 dokumen)	70,01			
4	05	4	05	1	01	06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 laporan	37.150.000 (7 laporan)	44.523.000 (7 laporan)	37.173.050,- (7 laporan)	83,49			
4	05	4	05	01	02		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur	1. Persentase tingkat capaian OPD dengan Laporan Kinerja BAlk	100%		80%	100%	125%			

								2. Persentase unit kerja yang diusulkan berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM	100%	N/A	40%	0	-			
4	05	4	05	01	02	08	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 laporan	92.598.470	153.860.000	140.542.230,-	91,34			
4	05	4	05	01	02	10	Penanganan Whistle Blower System	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A			
4	05	4	05	01	02	11	Evaluasi Lapkin dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Jumlah evaluasi pada provinsi dan kab/kota	8 instansi	N/A	N/A	N/A	N/A			
4	05	4	05	01	02	12	Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja ZI	5 unit kerja	N/A	N/A	N/A	N/A			
4	05	4	05	01	02	13	Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A			
							Pembinaan dan penyusunan pelaporan e-LHKPN	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	N/A	N/A	N/A	N/A			
							Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan korsupgah	Persentase penyelesaian laporan dalam Sistem MCP	100%	N/A	N/A	N/A	N/A			
4	05	4	05	1	03		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	1. Persentase rekomendasi temuan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti 2. Persentase kerugian daerah yang telah diselesaikan/ dilunasi	94% 95%		90%	90,68% 88,62%	100,75% 95,29%			

								3. Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100%		100%	100%	100%			
4	05	4	05	1	03	01	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Persentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	20%	522.066.240	315.304.000	284.954.000,-	90,37			
4	05	4	05	1	03	02	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi dalam audit/reviu/evaluasi/pemantuan	160 obrik	2.203.811.214	2.579.720.000	2.357.875.050	91,40			
4	05	4	05	1	03	03	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Volume pelaksanaan rakorwasda terhadap penentuan PKPT	2 rakor 1 PKPT	95.163.775	172.919.000	161.953.178	93,66			
4	05	4	05	1	03	04	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas TL penyelesaian Rekomendasi LHP APIP dan BPK	160 obrik	557.808.100	506.624.000,-	503.761.184	99,43			
4	05	4	05	1	03	05	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 laporan	252.773.740	161.226.000	140.510.000	87,15			
4	05	4	05	1	03	07	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak-lanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	20 laporan pengaduan	101.500.000	145.375.000,-	132.839.900	91,38			

							Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut atas hasil Pengawasan APIP dan BPK	160 obrik	114.010.200	N/A	N/A	N/A			
4	05	4	05	01	04		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya	1. Persentase OPD yang menerapkan SPIP 2. Peningkatan level capaian Kapabilitas APIP	100% L4		100% L3	36,29% L2 +	36,29% L2 +			
4	05	4	05	01	04	05	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap perangkat daerah	42 OPD	N/A	193.780..000 ,-	153.329.110,-	79,13			
						06	Konsultasi Audit	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	42 OPD	N/A	N/A	N/A	N/A			
						07	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dan memahami SPIP	100 peserta	N/A	N/A	N/A	N/A			
4	05	4	05	01	04	08	Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Jumlah Monev SPIP yang dilaksanakan	4 kali	N/A	N/A	N/A	N/A			
							Sosialisasi SPIP	Jumlah sosialisasi SPIP yang dilaksanakan	4 kali	N/A	N/A	N/A	N/A			

							Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	100%	139.157.157	26.240.000,-	25.456.459,-	97,01			
							Survei Penilaian Integritas		200.000.000,-	N/A	N/A	N/A	N/A			

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa format isian tabel di atas mengacu pada Program dan Kegiatan serta Indikator dalam RPJMD Tahun 2017-2022, namun demikian untuk Program dan Kegiatan serta Indikator program dan kegiatan tahun 2017 telah diselaraskan/disesuaikan dengan indikator program dan kegiatan pada Renstra tahun 2017-2022.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- a. Semua program mencapai realisasi anggaran rata-rata di atas 90%, (*yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur, Program Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan serta Program Pelatihan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur Pengawasan, yang pada Renstra Tahun 2017-2022 dikelompokkan ke dalam 1 (satu) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan*).
- b. *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan 8 (delapan) kegiatan juga mencapai target di atas 90%, yang pada Renstra Tahun 2017-2022 berubah nomenklatur menjadi Program Pengawasan dan pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.*
- c. *Program Penataan Kebijakan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan reformasi Birokrasi dengan 2 (dua) kegiatan, yang pada Renstra Tahun 2017-2022 berubah nomenklatur menjadi Program Pengawasan dan pembinaan Pemerintahan dan Aparatur mencapai target di atas 80%.*

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas rata-rata adalah adanya komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan elemen terbawah dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan, sehingga target dapat tercapai dengan baik.

Begitu pun capaian kinerja keuangan kegiatan pada tahun 2018 sebagian besar pada kategori “sangat tinggi” dengan rincian sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja keuangan dengan kategori “sangat tinggi” ($\geq 91\%$ - 100%) diperoleh 9 kegiatan dari 15 kegiatan yang dilaksanakan atau sebesar 60% ;
- b. Capaian kinerja keuangan kategori “tinggi” ($\geq 76\%$ - 90%) diperoleh 5 kegiatan atau sebesar $33,33\%$
- c. Kategori “sedang” ($\geq 66\%$ - 75%) diperoleh 1 kegiatan atau sebesar $6,67\%$
- d. Tidak terdapat pencapaian kinerja keuangan dengan kategori “rendah” ataupun “sangat rendah”.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tugas pokok yang dititikberatkan pada sasaran dan program strategisnya dengan indikator masing-masing. Berdasarkan rewiu dan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan PD Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikatornya dalam Indikator Kinerja Utamam dan Indikator kinerja Kunci Rencana Strategis 2017-2022, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, disajikan dalam Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah ini, yaitu:

Tabel 2.2.1. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (thn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	RENSTRA 2018-2022 (Setelah verifikasi)											
A.	Indikator Sasaran											
1.	Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan			≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 3%		-	≤ 5%	≤ 3%	
2.	Nilai dan Level Capaian Maturitas SPIP			L3	L3	L3	L3	L2 +	-	L3	L3	
3.	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"			80,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	-	100,00 %	100,00%	
4.	Unit kerja yang ditetapkan berpredikat menuju WBK/ menuju WBBM			2 unit kerja	3	5	5	0	-	5	5	
B.	Indikator Program											

1.	Persentase rekomendasi temuan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti			90%	90%	92%	92%	90,68%	-	92%	92%	
2.	Persentase kerugian daerah yang telah diselesaikan/ Dilunasi			93%	93%	94%	94%	88,62%	-	94%	94%	
3.	Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4.	Persentase OPD yang menerapkan SPIP			100%	100%	100%	100%	36,29%	-	100%	100%	
5.	Level Capaian Kapabilitas APIP			L3	L3	L3	L3	L2 +	-	L3	L3	
6.	Persentase tingkat capaian OPD dengan laporan kinerja BAIK			80%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
7.	Persentase unit kerja yang diusulkan berpredikat menuju WBK/ menuju WBBM			40%	60%	100%	100%	0	-	100%	100%	
	T.A. 2017 & 2018 (Konsep Awal Renstra)											
1.	Prosentase OPD yang tidak memiliki temuan materiil			-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Nilai capaian komponen Akuntabilitas SPIP			-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Persentase OPD yg memperoleh nilai SAKIP min. BAIK			-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.3.1. Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan, Inspektorat mendukung pencapaian Misi Kelima dalam RPJMD Tahun 2017-2022 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pembangunan Demokrasi”** dengan tujuan **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkualitas”**

Secara kelembagaan, kinerja Inspektorat dapat dinilai dari Tingkat Kapabilitas APIP sebagaimana kriteria penilaian Internal Audit Capability Model (IACM) yang membagi Kapabilitas APIP ke dalam lima Tingkatan/Level, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dan tengah melakukan upaya-upaya peningkatan Kapabilitas APIP dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2019 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP untuk memenuhi amanat RPJMN Level 3 dengan sedikit pemenuhan infrastruktur dan elemen untuk pencapaian tersebut, diantaranya dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam bidang pengawasan yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori tugas pengawasan, yaitu:

A. Kinerja Rutin Pengawasan dan kinerja, dengan kegiatan:

1. Reviu RPJMD,
2. Reviu Renstra PD
3. Reviu RKPD,
4. Reviu Renja PD
5. Reviu KUA-PPAS
6. Reviu RKA SKPD,
7. Reviu LKPD,

8. Reviu Laporan Kinerja (capaian yang paling signifikan dari tahun sebelumnya karena seluruh OPD memperoleh predikat nilai BB atas laporan kinerja Tahun 2017, dan selanjutnya ditargetkan oleh kepala daerah untuk dapat meraih nilai A)
 9. Reviu penyerapan anggaran dan reviu penyerapan PBJ, pemeriksaan reguler perangkat daerah dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak, evaluasi SPIP, evaluasi LPPD, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP
 10. Hal baru dilakukan adalah pemeriksaan/audit kinerja, khusus terkait pelayanan publik dan pemeriksaan/audit atas optimalisasi pendapatan.
- B. Pengawasan/Asistensi Program Prioritas Nasional:
1. Monitoring dan evaluasi dana desa dan dana BOS
 2. Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
 3. Operasionalisasi kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (bersama dengan Polda Babel dan stakeholder lainnya)
 4. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
- C. Pengawasan Reformasi Birokrasi
1. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (capaian program nilai 70,79)
 2. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik
 3. Verifikasi data sistem MCP KPK atas Pelaporan Rencana Aksi PPK terintegrasi dan Korsupgah
 4. Verifikasi LHKPN/LHKASN

Hal yang menjadi isu penting dalam capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2018 untuk pencapaian kinerja pembangunan prioritas program nasional adalah:

1. Terkoreksinya peningkatan level capaian Kapabilitas APIP dari setelah diverifikasi Tim Penilai Pusat yang sebelumnya LEVEL 3 ke LEVEL 2 plus hingga sampai saat ini ditargetkan kembali ke LEVEL 3
2. Tercapainya peningkatan Level Kematangan Maturitas SPIP dari LEVEL 1 menjadi LEVEL 2 plus, yang merupakan pencapaian yang signifikan, dan akan terus diupayakan menuju level 3 hingga 2019.
3. Terlaksananya kegiatan SPIP dan Konsultasi Audit pada Tahun 2018 serta asistensi binwas dan pendampingan APIP pada setiap Perangkat Daerah.

Selain itu tercapainya Kesepakatan Kerjasama Pengawasan Tahunan antara Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal bulan Agustus 2018 terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di samping pelaksanaan telaahan sejawat untuk pertama kalinya dengan APIP kabupaten/kota serta penyamaan persepsi terkait Pelaksanaan Pengawasan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lebih dari itu, tercapainya kesepakatan bersama antara Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen K/L teknis lainnya pada Rakorwasdanas dalam rangka konsolidasi dan sinkronisasi dalam hal penetapan kebijakan dan program pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Kemudian dilaksanakannya Penandatanganan Komitmen Bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda, Kejati dengan KPK yang difasilitasi oleh KPK di awal Tahun serta berlangsungnya korsiupgah terkait 12 sektor area pencegahan korupsi dengan KPK yang masuk dalam Stranas Pencegahan Korupsi, serta Penandatanganan Kesepakatan antara API dan APH di tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam Negeri.

2.3.2. Permasalahan

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Inspektorat dalam penguatan peran kelembagaan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Tahun 2018 adalah masih seputar kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan, kurangnya jumlah SDM yang bersertifikasi teknis tertentu/spesialisasi khusus serta sarana/prasarana yang belum memadai, sehingga Inspektorat harus berupaya keras untuk meningkatkan APIP sebagai media *preventive*, *consultative* dan *quality assurance* dalam memberikan keyakinan yang memadai dan peran konsultansi dalam tugas pembinaan dan pengawasan, Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Lumayan banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang sulit ditindaklanjuti dan kadaluarsa, utamanya terkait kerugian daerah tahun-tahun awal terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pemenuhan Tingkat Kapabilitas APIP yang belum berada pada Level 3 penuh dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang masih lemah;
3. Peran APIP sebagai Katalis dan fungsi *quality assurance* dan *consulting partner* sebagai perubahan dari paradigma “*Watchdog*” untuk pencegahan dan peringatan dini belum berjalan sepenuhnya;
4. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang belum sepenuhnya berbasis resiko;

5. Belum terpenuhinya anggaran pengawasan yang ideal dibandingkan dengan kewenangan Inspektorat yang semakin luas dan kompleks;
6. Tingginya kesenjangan/gap antara fungsional dan sekretariat serta ketimpangan beban kerja yang “*overweight*” pada suatu bidang dengan struktur organisasi yang kecil.

Hal ini sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja Inspektorat yang pada akhirnya akan berdampak pada dukungan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Gubernur selaku Kepala Daerah.

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP memiliki peran penting dan strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Segala permasalahan yang menjadi hambatan akan berdampak pada pencapaian visi dan misi serta tujuan, sasaran dan program unggulan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan pencapaian Rencana Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdampak pada pencapaian agenda nasional “,pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) “ menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunanberkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, adan inklusif di semua tingkatan”

2.3.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Semakin bertambahnya kewenangan pengawasan yang dilimpahkan kepada Inspektorat;
2. Semakin meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat atas pelayanan publik;

3. semakin Tingginya tuntutan dan harapan masyarakat/publik terhadap capaian kinerja Inspektorat;

Sedangkan peluang yang ada adalah:

1. Peraturan perundang-undangan yang semakin kuat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Komitmen pimpinan daerah yang tinggi untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel;
3. Tercipta dan terbukanya kerjasama yang makin baik antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH), baik dengan KPK terkait Rencana Aksi PPK Terintegrasi, kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan berkaitan dengan saber pungli dan TP4D.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dan disajikan dalam Tabel 2.4.1. berikut:

Tabel 2.4.1. (T-C.31)
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	1,644,000,000.00	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	1,644,000,000.00	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	638,410,000.00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	8,638,410,000.00	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang/ Kab/Kota/Luar Daerah	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	529,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang/ Kab/Kota/Luar Daerah	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	529,000,000.00	PPRG

4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	16,719,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	16,719,000.00	
5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkalpinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	12,700,000.00	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkalpinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	12,700,000.00	
6	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 Laporan	75,350,000.00	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	4 Laporan	75,350,000.00	
7	Penanganan Whistle Blower System	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 laporan	55,000,000.00	Penanganan Whistle Blower System	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	12 laporan	55,000,000.00	
8	Evaluasi Lapkin dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Peningkatan Nilai Sakip/LPPD	Lapkip/ LPPD PD Prov dan Kab/Kota	250,000,000.00	Evaluasi Lapkin dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Peningkatan Nilai Sakip/LPPD	Lapkip/ LPPD PD Prov dan Kab/Kota	250,000,000.00	PPRG

9	Penilaian Internal Zona Integritas	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Jumlah Unit Kerja ZI	5 unit kerja	16,950,000.00	Penilaian Internal Zona Integritas	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Jumlah Unit Kerja ZI	5 unit kerja	125,000,000	PPRG
10	Monev Laporan Gratifikasi	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Jumlah Laporan Gratifikasi	12 laporan	31,799,800,00	Monev Laporan Gratifikasi	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Jumlah Laporan Gratifikasi	12 laporan	31,799,800,00	
11	Pembinaan dan penyusunan pelaporan e-LHKPN	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	158,864,490.00	Pembinaan dan penyusunan pelaporan e-LHKPN	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	158,864,490.00	
12	Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan korusupgah	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Persentase penyelesaian laporan dalam Sistem MCP	100%	10.250.000,00	Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan korusupgah	Pangkalpinang/Ka b/Kota/Luar Daerah	Persentase penyelesaian laporan dalam Sistem MCP	100%	10.250.000,00	
13	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pangkalpinang	Jumlah pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap perangkat daerah	seluruh PD Pemprov	45,799,750.00	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pangkalpinang	Jumlah pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap perangkat daerah	seluruh PD Pemprov	45,799,750.00	PPRG
14	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	100 orang	245,885,000.00	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	100 orang	245,885,000.00	PPRG
15	Konsultasi Audit	Pangkalpinang	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	seluruh PD Pemprov	15,000,000.00	Konsultasi Audit	Pangkalpinang	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	seluruh PD Pemprov	15,000,000.00	PPRG
16	Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Pangkalpinang	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	100%	80,000,000.00	Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Pangkalpinang	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	100%	80,000,000.00	
17	Survei Penilaian Integritas	Pangkalpinang			200,000,000.00	Survei Penilaian Integritas	Pangkalpinang			200,000,000.00	

18	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Pangkalpinang/Luar Daerah	Persentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	20%	98,000,000.00	Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Pangkalpinang/Luar Daerah	Persentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	20%	98,000,000.00	PPRG
19	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Pangkalpinang/Kab/Kota/Luar Daerah	Jumlah PD yang diawasi dalam audit/reviu/evaluasi/pemantuan	160 obrik	2,787,000,000.00	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Pangkalpinang/Kab/Kota/Luar Daerah	Jumlah PD yang diawasi dalam audit/reviu/evaluasi/pemantuan	160 obrik	2,787,000,000.00	PPRG
20	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pangkalpinang/kab/kota	Volume pelaksanaan rakorwasda terhadap penentuan PKPT	2 rakor 1 PKPT	203,719,000.00	Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Pangkalpinang/kab/kota	Volume pelaksanaan rakorwasda terhadap penentuan PKPT	2 rakor 1 PKPT	203,719,000.00	
21	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas TL penyelesaian Rekomendasi LHP APIP dan BPK	160 obrik	593,950,000.00	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Pangkalpinang	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas TL penyelesaian Rekomendasi LHP APIP dan BPK	160 obrik	593,950,000.00	PPRG
22	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang/kab/kota/luar daerah	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 laporan	325,000,000.00	Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkalpinang/kab/kota/luar daerah	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	2 laporan	325,000,000.00	

23	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Pangkalpinang/kab/kota/luar daerah	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak-lanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	20 laporan pengaduan	235,000,000.00	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Pangkalpinang/kab/kota/luar daerah	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak-lanjuti atas keuangan dan barang negara/daerah	20 laporan pengaduan	235,000,000.00	PPRG
----	--	------------------------------------	---	----------------------	----------------	--	------------------------------------	---	----------------------	----------------	------

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, telah diamanatkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Dalam RPJMN 2015-2019 tahapan pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara yang mampu mendukung pembangunan nasional. Salah satu agenda pokok adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta efektif dengan didukung aparatur yang kompeten dan pengawasan yang efektif, yang sekaligus menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019 dan sejalan dengan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat terkait dengan sasaran target kinerja Inspektorat sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu:

Tabel 3.2.1

**Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran Renstra inspektorat 2017-2022 (Updating)**

No.	TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien dan efektif	Nilai penguatan pengawasan pada Komponen Proses IRB	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase tingkat materialitas temuan hasil pemeriksaan	≤5%	≤5%	≤5%	≤3%	≤3%
			Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern	Nilai dan Level capaian Maturitas SPIP	L3	L3	L3	L 3	L4
			Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP "BB"	80	100	100	100	100
			Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/ menuju WBBM	Unit kerja yg ditetapkan berpredikat menuju WBK/ menuju WBBM	2	3	5	5	5
Sektorat Daerah Provinsi Kepulauan Belitong								35	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mendukung tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilakukan pencapaian strategi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan melakukan langkah-langkah antara lain:

1. Mendorong Percepatan dan peningkatan penggunaan sistem aplikasi berbasis elektronik, mulai dari program perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset hingga monitoring dan evaluasi secara terintegrasi;
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan pihak- pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Melakukan pengawasan secara berkala kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Audit, Reviu, konsultasi, pemantauan dan pengawasan lain, baik pemeriksaan reguler atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan, pengelolaan barang milik daerah/aset, reviu terhadap LKPD, serta pemeriksaan lainnya dalam rangka pembinaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
4. Melakukan evaluasi yang lebih fokus dan berkualitas terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui laporan pengaduan masyarakat;
6. Penyelesaian Tindak Lanjut secara cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil temuan pengawasan;

7. Memberikan kesempatan kepada tenaga aparatur pengawas dan auditor untuk meningkatkan kemampuan kompetensi di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

Untuk mencapai strategi di atas, ditetapkan kebijakan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

- 1) Memaksimalkan peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Penguatan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 2) Memaksimalkan Peran APIP sebagai katalis dalam pendampingan dan asistensi serta memperbanyak volume konsultasi kepada setiap Perangkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan secara lebih *preventive*, *consultative* dan *quality assurance* untuk memberikan keyakinan yang lebih memadai
- 3) Peningkatan pelayanan publik yang berasaskan *good governance* dan *clean government* diprioritaskan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyelesaian penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pengawasan dalam upaya menemukan penyebab terjadinya penyimpangan, hambatan serta kelemahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan;
- 5) Peningkatan kualitas aparatur di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diprioritaskan pada upaya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang bersertifikasi teknis keahlian tertentu.

Strategi dan kebijakan yang diambil berpedoman pada tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022. Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif atas strategi dan kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan Renja Tahun 2018 sebagai berikut, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif

Sasaran 1.

“Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”

❖ ***Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan 6 (enam) kegiatan yaitu:***

- a) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- b) Pelaksanaan koordinasi pengawasan daerah;
- c) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
- d) Penyelesaian TPTGR oleh Majelis Pertimbangan dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah;
- e) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda;
- f) Sapu Bersih Pungli di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran 2.

“Meningkatnya kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”

❖ ***Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan Sosial Ekonomi dan Budaya, dengan 5 (lima) kegiatan yaitu :***

- a) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah
- c) Konsultasi Audit.
- d) Peningkatan sistem aplikasi pengawasan;
- e) Survei Penilaian Integritas

Sasaran 3.

“Meningkatnya implementasi penguatan SAKIP”

Sasaran 4.

“Meningkatnya penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK/menjuju WBBM”

❖ ***Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur, dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :***

- a) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b) Penanganan Whistle Blower System;
- c) Evaluasi Lapkin dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota;
- d) Penilaian Internal Zona Integritas;
- e) Monev Laporan Gratifikasi;
- f) Pembinaan dan penyusunan pelaporan e-LHKPN;
- g) Pelaporan Rencana Aksi PPK Terintegrasi dan Korsupgah.

Sedangkan rencana program dan kegiatan yang merupakan rutin operasional kantor/organisasi adalah sebagai berikut, yaitu:

Tujuan umum: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik oleh Perangkat Daerah

Sasaran Umum: Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik oleh Perangkat Daerah

❖ **Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan ,
dengan 5 (lima) kegiatan, yaitu:**

- a) Pelayanan administrasi perkantoran;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- c) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d) Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- e) Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Pada Program ini kembali diusulkan untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor untuk kali keempat dengan didahului revisi kegiatan DED yang telah ada sejak Tahun Anggaran 2015.

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan guna menjalankan dan melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan di atas sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Secara singkat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.1 (T-C.33)

**Rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan
Prakiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada inspektorat Daerah**

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (secara umum di + 10%)
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	05						FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN								
4	05	01					INSPEKTORAT DAERAH								
4	05	01	01				INSPEKTORAT DAERAH								
4	05	4	05	1	01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah								
4	05	4	05	1	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	1,644,000,000.00	APBD		100%	
4		4	05	1	01	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	100%	8,638,410,000.00	APBD		100%	

4	05	4	05	1	01	04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang/ Kab/Kota/Luar Daerah	Prosentase jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	529,000,000.00	APBD		100%	
4	05	4	05	1	01	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85%	4 Dokumen	16,719,000.00	APBD		4 Dokumen	
4	05	4	05	1	01	06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkalpinang	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	7 Laporan	12,700,000.00	APBD		7 Laporan	
4	05	4	05	1	02		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur								
4	05	4	05	1	02	08	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Pangkalpinang/Kab/ Kota/Luar Daerah	4 Laporan	75,350,000.00	APBD		4 Laporan	
							Penanganan Whistle Blower System	Jumlah laporan pengaduan melalui WBS	Pangkalpinang/Kab/ Kota/Luar Daerah	12 laporan	55,000,000.00	APBD		12 laporan	
4	05	4	05	1	02	09	Evaluasi Lapkin dan EKPPD/LPPD Prov dan Kab./ Kota	Peningkatan Nilai Sakip/LPPD	Pangkalpinang/Kab/ Kota/Luar Daerah	8 instansi	250,000,000.00	APBD		8 instansi	
							Penilaian Internal Zona Integritas	Jumlah Unit Kerja ZI	Pangkalpinang/Kab/ Kota/Luar Daerah	5 unit kerja	16,950,000.00	APBD		5 unit kerja	

							Monev Laporan Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi	Pangkalpinang/Kab/ Kota/Luar Daerah	12 laporan	31,799,800,00	APBD		12 laporan	
							Pembinaan dan penyusunan pelaporan e-LHKPN	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	Pangkalpinang/Kab/ Kota/Luar Daerah	100%	158,864,490.00	APBD		100%	
							Pelaporan rencana aksi PPK terintegrasi dan korsupgah	Persentase penyelesaian laporan dalam Sistem MCP	Pangkalpinang/Kab/ Kota/Luar Daerah	100%	10.250.000,00	APBD		100%	
4	05	4	05	1	03		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah								
							Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Persentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah	Pangkalpinang/Luar Daerah	15%	98,000,000.00	APBD		15%	
							Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah PD yang diawasi dalam audit/ reviu/evaluasi/ pemantuan	Pangkalpinang/Kab/ Kota/Luar Daerah	150 obrik	2,787,000,000.00	APBD		150 obrik	
							Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Volume pelaksanaan rakorwasda terhadap penentuan PKPT	Pangkalpinang/kab/ kota	2 rakor 1 PKPT	203,719,000.00	APBD		2 rakor 1 PKPT	
							Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah evaluasi dan Pemantauan yang dilaksanakan atas TL penyelesaian Rekomendasi LHP APIP dan BPK	Pangkalpinang	150 obrik	593,950,000.00	APBD		150 obrik	
							Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Laporan Tim Satgas Saber Pungli atas uang dan barang daerah	Pangkalpinang/kab/ kota/luar daerah	2 laporan	325,000,000.00	APBD		2 laporan	

							Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda	Jumlah pengaduan kasus yang ditindak-lanjuti atas keuangan dan barang negara/ daerah	Pangkalpinang/kab/ kota/luar daerah	15 laporan pengadu an	235,000,000.00	APBD		20 laporan pengadu an	
4	05	4	05	1	04		Prog.Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya								
4	05	4	05	1	04	05	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pangkalpinang	Jumlah pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap perangkat daerah	seluruh PD Pempro v	45,799,750.00	APBD		seluruh PD Pemprov	
4	05	4	05	1	04	06	Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Pangkalpinang	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	100 orang	245,885,000.00	APBD		100 orang	
							Konsultasi Audit	Pangkalpinang	Jumlah konsultasi yang dilaksanakan	seluruh PD Pempro v	15,000,000.00	APBD		seluruh PD Pemprov	
							Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	Pangkalpinang	Tingkat akurasi data hasil pengawasan atas Pemeriksaan APIP dan BPK	100%	80,000,000.00	APBD		100%	
							Survei Penilaian Integritas	Pangkalpinang			200,000,000.00	APBD			

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen rencana kerja dalam periode 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran yang disusun dengan memedomani Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Rencana Kerja Tahun 2019 sampai dengan periode Triwulan I yang telah dilaksanakan.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 ini juga mengacu pada Rencana Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagai wujud dukungan dan komitmen Inspektorat terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai alat bantu “*tools*” dalam rangka menyelaraskan program/kegiatan di Inspektorat dengan visi misi dan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD Tahun Tahun 2017 – 2022, dengan tambahan usulan anggaran sebesar delapan milyar rupiah untuk pembangunan gedung Inspektorat berdasarkan DED Tahun 2015 yang masih memerlukan revisi, serta terdapat tambahan kegiatan baru “Survei Penilaian Integritas” KPK, sedangkan kegiatan lain menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Mudah-mudahan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2020 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat dilaksanakan dengan baik guna mendukung program pembangunan daerah sesuai visi misi kepala daerah walaupun dengan ketersediaan alokasi anggaran dan jumlah dana yang sangat terbatas sehingga akan mendekati capaian target program/kegiatan dan kinerja yang diharapkan.

Pangkalpinang, Maret 2019

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SUSANTO, S.E. Ak. CA. M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196306121985031001

L
a
m
p
i
r
a
n



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Komplek Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Belitung No 3 Kel Air Hitam, Telp / Fax (0717) 434693
PANGKALPINANG 33149